



P E N E T A P A N

Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

M Oding Muktadir HS bin KH Sobandi, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 15 September 1957 (63 Tahun), agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorar, bertempat kediaman di Kp. Rancapanggung RT 002 RW 005 Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

Eni Rohmayani binti H Lili, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 09 September 1959 (61 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kp. Rancapanggung RT 002 RW 005 Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya juga disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada 03 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 133/Pdt.P/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 September 1972 menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak H Lili yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak H Enoch dan Bapak KH Ahmad serta orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas Kawin berupa Emas 5 Gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka;
4. Bahwa Pemohon II berstatus Gadis. Adapun diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di di Kp. Rancapanggung RT 002 RW 005 Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yang bernama:
 - a. Siti Jenab Febriani binti M Oding Muktadir HS , tanggal lahir 01 Maret 1982
 - b. Saepul Pajri bin M Oding Muktadir HS , tanggal lahir 03 Mei 1987;
 - c. Elis Samsiah binti M Oding Muktadir HS , tanggal lahir 07 Mei 1993;
 - d. Agus Syafarudinsyah bin M Oding Muktadir HS , tanggal lahir 03 Agustus 1996;
 - e. Wardatun Nisa binti M Oding Muktadir HS , tanggal lahir 07 Maret 1997;
 - f. Widia Turohman binti M Oding Muktadir HS , tanggal lahir 12 April 1998;
 - g. Aden Hatami Raji bin M Oding Muktadir HS , tanggal lahir 09 September 1999

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat Nomor: B.129/Kua.10.26.05/Pw.01/02/2021 tertanggal 25 Februari 2021, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan keabsahan Pernikahan serta untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**M Oding Muktadir HS bin KH Sobandi**) dan Pemohon II (**Eni Rohmayani binti H Lili**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1972 di wilayah Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**M Oding Muktadir HS bin KH Sobandi**) dan Pemohon II (**Eni Rohmayani binti H Lili**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Oding Muqtadir HS dengan NIK: 321711150950001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Rohamayani dengan NIK: 3217114909590005, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama M. Oding Muqtadir HS dan Eni Rohamayani dengan Nomor: B.129/kua.10.26.05/Pw.01/02/2021, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2021/PA.Nph



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **H. Cecep Anwar bin H. Pani** umur 75 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Bebedahan RT.001 RW.001 Desa Neglasari Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 09 September 1972;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak H. Lili selaku Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak H Enoh dan Bapak KH Ahmad;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa perhiasan emas seberat 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keabsahan pernikahan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Emen bin Juhasik**, umur 82 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Bebedahan RT.001 RW.001 Desa Neglasari Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 09 September 1972;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak H. Lili selaku Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak H Enoch dan Bapak KH Ahmad;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keabsahan pernikahan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 09 September 1972, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak H. Lili, dengan maskawin berupa perhiasan emas seberat 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak H Enoh dan Bapak KH Ahmad, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keabsahan pernikahan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, s/d P.3. dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2021/PA.Nph



Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon yaitu H. Cecep Anwar bin H. Pani dan Emen bin Juhasik yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti *a quo* dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 09 September 1972 di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak H. Lili, dengan maskawin berupa perhiasan emas seberat 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak H Enoch dan Bapak KH Ahmad;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keabsahan pernikahan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 sampai pasal 25 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No. 133/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1972 di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Oding Muqtadir HS bin KH Sobandi**) dengan Pemohon II (**Eni Rohamayani binti H. Lili**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1972, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**M. Oding Muqtadir HS bin KH Sobandi**) dan Pemohon II (**Eni Rohamayani binti H. Lili**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 340.000,00,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Liza Roihanah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.** dan **Subhi Pantoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Jaenudin Ramdhan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Zuhairi Baratha Ashbahi, S.H.I., M.H.

Liza Roihanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jaenudin Ramdhan, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- PNBP panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.133/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)